

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penggunaan SIPD merupakan langkah yang baik untuk mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih modern dan terintegrasi di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. SIPD dibuat untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menyusun rencana, mengatur anggaran, dan membuat laporan keuangan secara digital, sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan sistem ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat bisa menginput data Renja mulai dari nama kegiatan, anggaran, hingga rincian belanja, semuanya dilakukan melalui sistem online yang langsung terhubung ke pusat data nasional.

Meskipun sistem ini sangat membantu, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Misalnya, sistem SIPD kadang error, sehingga data yang sudah dimasukkan tidak muncul saat akan dicetak. Selain itu, daftar harga yang dibutuhkan dalam pengisian anggaran belum lengkap atau belum diperbarui, sehingga menyulitkan proses penginputan. Ada juga beberapa bagian penting dalam penyusunan Renja yang belum tersedia dalam sistem, seperti fitur untuk memasukkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya yang sebenarnya wajib sesuai aturan Permendagri 86 Tahun 2017. Masalah lainnya adalah belum semua pegawai benar-benar memahami cara menggunakan sistem ini dengan baik, karena masih ada keterbatasan dalam pelatihan dan pendampingan teknis.

Secara keseluruhan, penggunaan SIPD sudah menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki, baik dari sisi sistem yang digunakan, fitur yang disediakan. Jika semua hal tersebut dapat ditingkatkan, maka SIPD akan menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk membantu pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan yang lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Sebelum proses penyusunan Rencana Kerja dimulai, sebaiknya aplikasi SIPD sudah siap digunakan agar tidak terjadi gangguan atau error yang bisa memperlambat pekerjaan. Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aplikasi ini perlu memastikan sistem sudah berjalan dengan baik sebelum digunakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, daftar harga yang dibutuhkan untuk mengisi anggaran di dalam SIPD juga harus sudah tersedia dan lengkap, supaya proses penginputan dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai kebutuhan. Tak kalah penting, seluruh komponen penyusunan Rencana Kerja yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga sebaiknya sudah tersedia di sistem, termasuk bagian untuk memasukkan hasil evaluasi kerja dari tahun sebelumnya yang menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.